

Pekerja Sosial Dalam Bimbingan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensoriki Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang

Maria Goreti Fono¹, Mariana Ikun RD Pareira², Erni Raster Klau³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Nusa Cendana

Email: Sofisuy123@gmail.com, Mariana.Pareira@staf.undana.ac.id,
erny.klau@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Maria Goreti Fono. NIM: 1701170029. Skripsi dengan judul Pekerja Sosial dalam Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang. Skripsi program Strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas rungu wicara dan mengetahui peran pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang pekerja sosial, dua orang instruktur keterampilan dan dua orang penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat, terdapat 7 (tujuh) tahap yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu tahap akses, tahap intake dan engagement, tahap asesmen, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monitoring dan evaluasi dan pascalayanan dan terminasi. Pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, mediator, pemungkin (*enabler*), konselor dan pendidik (*educator*). Faktor pendukung bimbingan yaitu adanya kerja sama antara peksos dan instruktur, dukungan dana dari APBN Kemensos, motivasi penerima manfaat yang baik, keikhlasan peksos, fasilitas yang memadai dan kurikulum yang fleksibel. Faktor penghambat yaitu penerima manfaat membutuhkan waktu adaptasi yang lama, penerima manfaat mempunyai keterbatasan dalam hal membaca, kemampuan penerima manfaat yang berbeda-beda dan cepat melupakan materi, kurang terbuka penerima manfaat terhadap pekerja sosial dan penerima manfaat yang sulit memahami gerak bibir instruktur saat menjelaskan materi.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Bimbingan Keterampilan, Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

Social Workers In Skills Guidance For People With Deaf And Speaking Disabilities At The Social Rehabilitation Center For People With Deaf And Speaking Sensory Disabilities (BRSPDSRW) Efata Kupang

ABSTRACT

Maria Goreti Fono. NIM: 1701170029. Thesis with the title Social Worker in Skills

Guidance for Persons with Speech Deaf Disabilities at the Social Rehabilitation Center for People with Sensory Deaf and Speech Disabilities (BRSPDSRW) Efata Kupang. Thesis program strata 1 and sciences faculty in teacher education courses outside of school education Nusa Cendana Kupang. The purpose of this study was to describe social workers in skills guidance for people with hearing and speech disabilities and to know the role of social workers in skills guidance at the Center for Social Rehabilitation of People with Deaf Sensory Disabilities. Dialogue (BRSPDSRW) Efata Kupang. This research uses a case study qualitative approach. The subjects in this study were two social workers, two skill instructors and two beneficiaries. Data was collected using interview, observation and documentation studies. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The triangulation used to explain the validity of the data is source triangulation and technical triangulation. The results of this study indicate that in skills guidance for beneficiaries, there are 7 (seven) stages carried out by social workers, namely the access stage, intake and engagement stage, assessment stage, planning stage, implementation stage, monitoring and evaluation stage and post-service and termination. . Social workers in skills guidance have roles as facilitators, motivators, mediators, enablers, counselors and educators. Supporting factors for guidance are cooperation between social workers and instructors, financial support from the Ministry of Social Affairs APBN, good motivation of beneficiaries, sincerity of social workers, adequate facilities and a flexible curriculum. The inhibiting factors are that the beneficiaries need a long adaptation time, the beneficiaries have limitations in terms of reading, the different abilities of the beneficiaries and quickly forget the material, the beneficiaries are less open to social workers and the beneficiaries who have difficulty understanding the instructor's lips when explaining the material.

Keywords: Social Worker, Skills Guidance, Persons with Deaf and Speech Disabilities

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut negara maju maupun negara berkembang untuk berkiprah di kancah internasional. Untuk dapat bersaing bukan semata dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas agar terciptanya hidup yang sejahtera. Terdapat persaingan antar individu di lingkungan sosial untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berkompeten. Dalam menjalankan aktivitas di lingkungan sosial dipengaruhi juga berbagai hal yang berbeda, seperti yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Orang dengan disabilitas

adalah individu yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki keunikan tersendiri, yang membuat penyandang disabilitas berbeda dengan individu lain pada umumnya, sehingga memerlukan pelayanan khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya kembali sebagai manusia seutuhnya yang hidup di muka bumi (Yasin & Aspari, 2020:394). Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pekerja sosial juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas

memperoleh hak atas kesempatan-kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan mengakses pelayanan-pelayanan yang tersedia bagi warga negara lain serta pelayanan-pelayanan spesialis yang dibutuhkan oleh kecacatan penyandang disabilitas yang spesifik (dalam Damanik, 2008:410).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Erniyanto selaku Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, Kementerian Sosial, dapat diketahui bahwa berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015 terdapat sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Kondisi umum penyandang disabilitas di masyarakat adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang termasuk sebagai penyandang disabilitas dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan lainnya (Kustiani, 2019).

Penyandang disabilitas yang menjadi fokus dalam penelitian adalah penyandang disabilitas rungu wicara. Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas tunarungu sebanyak 2077 orang, jumlah disabilitas tuna wicara sebanyak 1957 orang, dan jumlah disabilitas tuna rungu wicara sebanyak 1958 orang (BPS NTT, 2019).

Penyandang disabilitas di NTT masih sering mendapatkan tindakan diskriminasi dari

masyarakat. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Riwukore, dkk (2019) mengenai persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang menunjukkan bahwa kaum disabilitas dipandang sebagai orang yang mengalami diskriminasi dan stereotype secara biomedis, sosial, dan biopsikosial. Penyandang disabilitas di NTT masih dianggap sebagai masyarakat yang perlu dikasihani dan dilindungi sehingga penyandang disabilitas belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan-keterampilan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara sosial maupun ekonomi.

Perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi NTT dianggap belum maksimal. Sebagai contoh belum ada pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan penyediaan fasilitas yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas seperti penyediaan bidang miring di gedung-gedung fasilitas publik, penyediaan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas wicara di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, garis putus-putus di jalan-jalan atau trotoar untuk penyandang disabilitas netra dan para penyandang disabilitas masih belum memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah untuk menyediakan pemasaran produk kerajinan hasil karya penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020:134). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan dan berkontribusi dalam pembangunan

masih sangat kecil, oleh karena itu para penyandang disabilitas harus mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki agar mampu bersaing di dunia kerja ataupun dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Permasalahan publik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas kini bukan karena kekurangan yang dimilikinya, melainkan tentang bagaimana disabilitas tersebut memperoleh keterampilan atau keahlian serta pengetahuan sehingga menjadi individu yang mandiri dalam menyejahterakan hidupnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan saat ini ada 17,74 juta orang penduduk usia kerja (kurang lebih 15 tahun) yang merupakan penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,8 juta orang saja yang masuk ke angkatan kerja. Sehingga, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) disabilitas hanya 44 persen. Hal ini disebabkan karena banyak disabilitas yang sudah terlebih dahulu mundur dan tidak berani masuk ke pasar tenaga kerja sebagai akibat dari keterbatasan lapangan kerja, diskriminasi, serta kemungkinan terjadinya stigma terhadap penyandang disabilitas. Sejauh ini, lapangan kerja bagi penyandang disabilitas lebih banyak tersedia di sektor pelayanan, seperti jasa dan ritel. Sementara di sektor industri masih minim. Menurut Fauziyah salah satu faktornya adalah pelatihan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang tidak inklusif (Pebrianto, 2021).

Untuk menangani permasalahan tersebut, maka pemerintah membentuk lembaga

pelayanan sosial untuk penyandang disabilitas, yaitu berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai sebuah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada kasus disabilitas, menurut Soewito rehabilitasi diartikan sebagai segala bentuk daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir secara kontinyu dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penyandang disabilitas baik jasmaniah maupun rohaniah, agar dapat kembali produktif di dalam masyarakat (dalam Naibaho, dkk, 2015: 335).

Salah satu upaya pemberdayaan disabilitas khususnya penyandang disabilitas Rungu Wicara yaitu dengan memberikan bimbingan keterampilan sebagai bagian dalam upaya memandirikan penyandang disabilitas rungu wicara, serta mengoptimalkan potensi dan kreativitasnya sehingga bisa mengangkat derajatnya, yang dikalangan masyarakatnya dianggap hanya menyusahkan orang lain dan dipandang sebelah mata. Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang sebenarnya mempunyai kemampuan hanya faktor komunikasi saja yang harus sinergis. Negara juga memiliki kewajiban untuk membantu penyandang disabilitas untuk memiliki akses terhadap program bimbingan vokasional dan teknis.

Berdasarkan hasil wawancara

terhadap salah satu staf di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang dapat diketahui bahwa BRSPDSRW merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi langsung Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Secara teknis, BRSPDSRW Efata Kupang memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (PDRW), dengan wilayah jangkauan bukan hanya di NTT saja tetapi menjangkau beberapa daerah seperti NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

BRSPDSRW Efata Kupang berperan mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta pencapaian program rehabilitasi kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2018:4). Selama masa rehabilitasi di BRSPDSRW Efata Kupang Penerima manfaat diberikan beberapa bentuk bimbingan yaitu bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, serta bimbingan keterampilan. penyandang disabilitas yang diterima di BRSPDSRW Efata Kupang setiap tahunnya sebanyak 70 orang yang dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap satu pada bulan Januari sampai bulan Juni sebanyak 35 orang dan tahap dua pada bulan Juli sampai bulan Desember sebanyak 35 orang. Syarat usia penerima manfaat yaitu usia produktif (15-35 tahun) serta sehat jasmani dan rohani. Pelaksanaan bimbingan keterampilan diperlukan oleh penyandang disabilitas rungu

wicara, agar dapat hidup mandiri dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Terdapat beberapa jenis bimbingan keterampilan yang diselenggarakan di BRSPDSRW Efata Kupang seperti keterampilan pertukangan bangunan, pertukangan kayu, bengkel motor, bengkel las, salon, komputer, menjahit, kerajinan tangan, dan tenun ikat.

Proses bimbingan keterampilan selain melibatkan instruktur keterampilan tentunya tidak luput dari peran pekerja sosial, karena pekerja sosial yang mengetahui bagaimana program rehabilitasi sosial berlangsung dan lebih sering berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pekerja sosial juga saling berkoordinasi dengan instruktur dalam memberikan bimbingan keterampilan. Pekerja sosial yang ada di BRSPDSRW Efata Kupang kurang lebih sebanyak 12 orang. Setiap pekerja sosial diberikan tanggung jawab untuk membimbing 2 sampai 3 orang penerima manfaat selama kehidupannya di Balai Rehabilitasi Sosial dalam berbagai hal termasuk selama proses bimbingan keterampilan. Proses intervensi rehabilitasi sosial diserahkan kembali kepada pekerja sosial yang dalam melaksanakan tugas dan perannya. Pekerja sosial diharapkan mampu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di Balai.

Bimbingan keterampilan yang diberikan bukannya di dalam Balai melainkan penerima manfaat akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang sudah diajarkan di Balai Rehabilitasi Sosial dengan mengikuti

magang selama satu bulan di perusahaan menengah di Kabupaten maupun di Provinsi lain. Selama menjalankan magang, penerima manfaat akan tetap berada dibawah pendampingan pekerja sosial sampai pada tahap disidangkan atau dinyatakan sudah tamat dan dipulangkan ke pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam membimbing dan memantau perkembangan penerima manfaat dari segala aspek selama mengikuti bimbingan keterampilan di Balai maupun di luar Balai.

Penerima manfaat yang sudah selesai menjalani masa rehabilitasi akan diberikan sertifikat keterampilan atau vokasional yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi. Sejauh ini sudah sekitar 25 persen eks penerima manfaat yang bekerja di perusahaan sedangkan yang lainnya bekerja di mebel, bengkel, membuka usaha mandiri dan masih terdapat sebagian kecil yang tidak bekerja sehingga membutuhkan bimbingan lanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlangga, (2020) tentang peran pekerja sosial pada terapi dalam proses bimbingan keterampilan "Hasta Karya" bagi penyandang psikotik di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran sebagai fasilitator merupakan peran yang paling dominan dan utama di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, terutama pada tahap pembinaan khususnya pada terapi dalam proses bimbingan keterampilan,

Volume 5 Nomor 1 April 2025
yang bertujuan untuk melatih motorik kasar dan meningkatkan konsentrasi penyandang psikotik.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang, dengan judul "Pekerja Sosial dalam Proses Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menguraikan, menerangkan, dan menelaahmengenai pekerja sosial dalam proses bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas rungu wicara di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang.

Subjek dalam penelitian ini yaitu pekerja sosial, instruktur bimbingan keterampilan, dan penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Efata Kupang yang berjumlah 6 orang.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumen.

Setelah mengumpulkan data, maka peneliti harus menganalisis data yang telah didapatkan untuk mencapai tahap kevalidan data. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan

conclusion drawing/verification.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan teknik triangulasi data. Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber dan teknik untuk mengujikredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber untuk kemudian peneliti analisis dan memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pekerja Sosial dalam Tahap Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keterampilan bagi Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan beberapa informasi terkait pekerja sosial dalam tahap pelaksanaan pelayanan bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat di BRSPDSRW Efata Kupang yang melihat pada teori Max Siporin (dalam Huda, 2018:19-21) yang terdiri dari beberapa tahap yaitu *engagement, intake and contract, assessment, planning, intervention* dan *evaluation and termination*. Tahap pelaksanaan pelayanan pekerja sosial yang dijelaskan dalam teori Max Siporin berbeda dengan hasil temuan peneliti di BRSPDSRW Efata Kupang yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap yaitu akses, intake dan *engagemen*, asesmen, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, pasca layanan dan terminasi.

Tahapan yang membedakan yaitu tahap pelaksanaan pelayanan di BRSPDSRW Efata Kupang terlebih dahulu dimulai dengan tahap

Volume 5 Nomor 1 April 2025
akses. Tahap akses merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk menjaring calon penerima manfaat. Hal ini dilakukan oleh pihak lembaga karena, meskipun BRSPDSRW Efata Kupang sudah hadir sejak tahun 1994 di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun belum dikenal secara luas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tahap akses pada wilayah jangkauan balai sekaligus memberikan sosialisasi langsung untuk membangun kesadaran serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelayanan balai bagi penyandang disabilitas rungu wicara dan membangun kerja sama dengan mitra di daerah untuk mempermudah proses penjangkauan serta menunjukkan eksistensi lembaga sebagai suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyandang disabilitas sensorik rungu wicara di beberapa wilayah jangkauan pelayanan yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Beberapa tahap pelaksanaan pelayanan dalam bimbingan keterampilan di BRSPDSRW Efata Kupang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Max Siporin (Pairan, 2018:68) yang mengatakan bahwa terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan klien berhenti, ketika referral dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain sudah tidak akan terlibat lebih

lama lagi. Pelaksanaan terminasi oleh pekerja sosial di BRSPDSRW Efata Kupang terhadap eks penerima manfaat dilakukan setelah bimbingan lanjut melalui kegiatan kunjungan, namun dengan harapan agar eks penerima manfaat mampu memelihara dan meningkatkan perubahan-perubahan tersebut.

b. Peran Pekerja Sosial dalam Bimbingan Keterampilan bagi Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa peran yang dilaksanakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas rungu wicara sebagai penerima manfaat. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Parson, Jorgensen dan Hernandez (Herlangga, 2020:27 31) terdapat 11 (sebelas) peran yang dimiliki oleh pekerja sosial yaitu fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung, enabler, perunding, inisiator, negosiator, konselor dan *educator*. Namun berdasarkan temuan peneliti di lapangan, hanya terdapat 6 (enam) peran pekerja sosial yang sangat relevan untuk dilaksanakan dalam bimbingan keterampilan yaitu peran sebagai fasilitator, motivator, mediator, pemungkin (*enabler*), konselor dan pendidik (*educator*). Peran peksos ini sangat penting dilaksanakan, karena peran yang dijalankan harus disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dalam bimbingan keterampilan sehingga tidak semua peran peksos harus dilakukan selama proses bimbingan. Hal ini

dilakukan agar dapat memperoleh pelayanan optimal yang sesuai dengan hasil asesmen penerima manfaat dan tujuan bimbingan keterampilan.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez (Herlangga, 2020:31) yang menyatakan bahwa pekerja sosial berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu,

kelompok dan masyarakat. Peran pekerja sosial sebagai pendidik dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasikan dan melakukan pelatihan. Namun peran pekerja sosial sebagai pendidik ini belum dirasakan oleh penerima manfaat dalam bimbingan keterampilan karena pekerja sosial hanya datang untuk menanyakan masalah yang dihadapi penerima manfaat dalam bimbingan dan memotret anak-anak yang sudah dapat mengerjakan keterampilan khususnya anak yang didampinginya.

Pelaksanaan pelayanan bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas rungu wicara pekerja sosial di BRSPDSRW Efata Kupang sudah cukup optimal yang dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pada setiap tahap pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP balai dan terdapat instruktur keterampilan dan pekerja sosial yang juga sangat berperan di dalam proses

pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan keahlian yang mereka miliki. Terdapat 11 (sebelas) pekerja sosial baik pekerja sosial ahli maupun terampil yang mendampingi penerima manfaat yang sudah dibagi sesuai aturan balai. Pelayanan yang optimal dipengaruhi juga oleh kompetensi pekerja sosial yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Latar belakang pendidikan pekerja sosial di BRSPDSRW Efata Kupang cukup memadai karena tingkatan pendidikan paling rendah yaitu setara SMA dan terdapat juga yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan magister dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat tuntutan kerja yang cukup banyak, namun pekerja sosial dapat memberikan pelayanan yang baik karena terdapat salah satunya alasan yang mendasari pekerja sosial yaitu adanya komitmen pekerja sosial untuk membantu penyandang disabilitas rungu wicara yang ada di balai.

Pelayanan yang optimal di BRSPDSRW Efata Kupang juga didukung oleh beberapa faktor seperti adanya kerja sama yang baik antara pekerja sosial dengan instruktur bimbingan keterampilan dalam Pelaksanaan bimbingan Keterampilan maupun pemantauan perkembangan penerima manfaat, adanya keikhlasan dari pekerja sosial dalam memberikan pelayanan, motivasi penerima manfaat yang cukup tinggi dalam

Volume 5 Nomor 1 April 2025 mengikuti bimbingan meskipun harus terus dibimbing, dukungan dana yang berasal dari APBN Kemensos, Fasilitas dalam bimbingan keterampilan yang memadai dan kurikulum yang fleksibel sehingga silabus dan materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat sehingga dirancang sederhana mungkin agar cepat dipahami.

Pekerja sosial di BRSPDSRW Efata Kupang dalam memberikan pelayanan Khususnya bimbingan keterampilan juga mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari penerima manfaat yaitu membutuhkan adaptasi yang lama dan kadang mulai malas-malas karena baru mengenal lingkungan di balai. Hal ini dikarenakan salah satu karakteristik penyandang disabilitas rungu wicara

Tantangan lain yang dialami oleh pekerja sosial dan instruktur keterampilan yaitu keterbatasan dalam hal membaca yang membuat anak tidak dapat berimajinasi tinggi dan cukup sulit mengikuti bimbingan keterampilan. Hal ini didukung dengan teori menurut Gregory (dalam Saidah, 2017:38) yang menyatakan bahwa salah satu ciri penyandang disabilitas rungu wicara adalah mempunyai kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam hal membaca. Selain itu, hambatan yang berasal dari penerima manfaat yaitu kemampuan penerima manfaat yang berbeda-beda dan cepat

melupakan materi yang diajarkan. Hal ini juga disebabkan karena karakteristik penyandang disabilitas rungu wicara yaitu perkembangan intelektualnya terganggu (dalam Saidah, 2017: 37), sehingga dapat berpengaruh pada daya ingat penerima manfaat. Penerima manfaat juga tidak mudah untuk terbuka dan menceritakan masalah pada pekerja sosial, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja sosial dengan melakukan berbagai pendekatan sehingga dapat membuat penerima manfaat percaya dan terbuka dalam menceritakan masalahnya. Faktor penghambat yang terakhir yaitu penerima manfaat mengalami kesulitan memahami gerak bibir instruktur yang membuatnya sulit memahami materi yang diajarkan. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas rungu wicara mempunyai kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan (dalam Saidah, 2017:37).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) tahap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam memberikan bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat di BRSPDSRW Efata Kupang yaitu: tahap akses, tahap intake dan engagement, tahap asesmen, tahap perencanaan, tahap

implementasi, tahap monitoring dan evaluasi, dan pascalayanan dan terminasi.

2. Peran yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat di BRSPDSRW Efata Kupang yaitu: Fasilitator, motivator, mediator, pemungkin (*enabler*), konselor dan pendidik (*educator*).
3. Dalam proses pelaksanaan bimbingan keterampilan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas rungu wicara. Faktor pendukung dalam bimbingan keterampilan, yaitu adanya kerja sama antara pekerja sosial dengan instruktur keterampilan yang dapat mempermudah pemantauan perkembangan penerima manfaat, adanya dukungan dana dalam kegiatan bimbingan yang diperoleh dari APBN Kemensos, motivasi penerima manfaat yang cukup baik dalam mengikuti bimbingan, keikhlasan pekerja sosial dalam melayani penerima manfaat, fasilitas dalam bimbingan keterampilan yang cukup memadai dan kurikulum yang fleksibel sehingga rancangan silabus dan materi dibuat lebih sederhana oleh instruktur yang disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat agar cepat dipahami. Sedangkan faktor penghambat meliputi: penerima manfaat yang membutuhkan adaptasi yang lama dan kadang mulai malas-malas karena baru mengenal lingkungan baru, penerima manfaat memiliki keterbatasan dalam hal membaca yang

membuat anak tidak dapat berimajinasi lebih tinggi dan agak sulit dalam mengikuti bimbingan, penerima manfaat mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga kemampuannya menerima materi juga berbeda dan cepat melupakan materi yang diajarkan, penerima manfaat hanya diam dan tidak mau menceritakan masalahnya kepada pekerja sosial dan penerima manfaat sulit memahami gerak bibir Instruktur saat menjelaskan materi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pelayanan bimbingan keterampilan di BRSPDSRW Efata Kupang sudah cukup baik, namun akan lebih efektif jika seluruh petugas, baik pekerja sosial maupun instruktur keterampilan belajar untuk menggunakan bahasa isyarat secara mahir melalui pelatihan khusus, sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara penerima manfaat dan petugas pelayanan.
2. Untuk lembaga agar dapat memberikan pembelajaran membaca dan SIBI bagi penerima manfaat minimal dua kali dalam seminggu, karena kemampuan membaca sangat diperlukan dalam proses bimbingan keterampilan.
3. Untuk pekerja sosial di BRSPDSRW Efata Kupang agar dapat memahami karakteristik masing-masing penerima manfaat yang didampingim

Volume 5 Nomor 1 April 2025
melalui pendekatan secara individu serta memberikan perhatian dan motivasi layaknya seperti orang tua sehingga penerima manfaat selalu semangat dalam mengikuti bimbingan dan menjadi teman curhat ketika penerima manfaat menghadapi masalah.

4. Untuk penerima manfaat supaya lebih percaya akan kemampuan diri dan lebih terbuka kepada pekerja sosial dan lebih sering bercerita atau sharing mengenai kecemasan yang dirasakan, kendala maupun masalah yang dihadapi selama mengikuti bimbingan di dalam balai dengan memanfaatkan layanan konseling. Selain itu, pemenerima manfaat harus lebih tekun dan disiplin dalam mengikuti bimbingan keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018. Februari*. Provinsi NTT: Badan Pusat Statistik.
- Damanik, J. (2008). *Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Dinardo, D. (2017). *Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita*

- Yogyakarta (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Febriatun, Z. (2015). *Peran Pekerja Sosial pada Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan Menjahit Manual di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Mulya Jaya" Pasar Rebo-Jakarta Timur* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31976> diakses pada 28 Oktober 2020.
- Firmansyah, M.D. (2020). *Strategi Komunikasi Persuasif Terapis kepada Penyandang Tuna Wicara dalam Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi Sosial pada Klinik Bina Wicara Jakarta Pusat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Herlangga, A. (2020). *Peran Pekerja Sosial pada Terapi dalam Proses Bimbingan Keterampilan Hasta Karya bagi Penyandang Psikotik di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5108> diakses pada 14 September 2020.
- Huda, A.S. (2018). *Intervensi Pekerja Sosial dalam Proses Bimbingan Kesiapan Hidup Bermasyarakat Untuk Penyandang*
- Volume 5 Nomor 1 April 2025
Disabilitas Fisik di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. DR. Soeharto Surakarta (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullahin).
- Iskandar. (2019). *Intervensi dalam pekerjaan sosial*. Makasar: Innawa.
- Karnaedi, Y. (2020, Februari 24). *Minim, Penyandang Disabilitas yang Bekerja*. Balipost. <https://www.balipost.com/news/2020/02/24/105883/Minim,PenyandangDisabilitasyangBekerja.html> diakses pada 05 Oktober 2020
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Laporan Kinerja (Lkj) Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang* https://intelresos.kemensos.go.id/new/download/laporan/2018/SAKIP_EFATA_2018 diakses pada 14 Maret 2020
- Kurniawan, M.A. (2018). *Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Klien di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai" Yogyakarta*. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1):45-52. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/23648>.
- Kustiani, R. (2019, November 01). *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? Simak Data Ini* <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia->

- [simak-data-ini/full&view=ok](#) diakses pada 06 Oktober 2020
- Moleong, L.J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naibaho, M., Krisnani, H., & Nuriyah, E. (2015). Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 2442-4480.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131- 150. <https://core.ac.uk/download/pdf/322562053.pdf> diakses pada 06 Oktober 2020.
- Oktavia, R. (2021). *Fungsi Lembaga Siger Roemah Batik dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Olga, S., Konradus, B., & Wutun, M. (2019). Etnografi Komunikasi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1297-1310. <http://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2060> diakses pada 22 Januari 2021.
- Pairan. (2018). *Metode Intervensi* Pekerja Sosial dengan Individu dan Keluarga. UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember
- Pane, Nursyahidah. (2017). *Pembinaan Keagamaan Anak Tuna Rungu Wicara di Unit Pelaksanaan Teknis Panti Sosial Pematang Siantar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Pebrianto, Fajar. (2021, Februari 24). *Menaker Sebut Hanya 7,5 Juta Penyandang Disabilitas yang Bekerja*. <https://bisnis.tempo.co/read/1436151/menaker-sebut-hanya-75-juta-penyandang-disabilitas-yang-bekerja> diakses pada 25 Februari 2021
- Prasojo, Pahri. (2020). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Malang. *Jurnal ilmiah*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6683/5796> diakses pada 22 Januari 2021.
- Riwukore, J.R., Habaora, F., Susanto, Y., & Manafe, H. (2019). Persepsi Publik terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18 (3), 209-218. <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/jpks/article/view/1871> diakses pada 06 Oktober 2020.
- Saidah, D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Keterampilan Handicraft: Tuna Rungu Wicara di Yayasan Rumah Regis Tanjung Barat Jakarta*

- Selatan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Journal of Social Welfare*. 20 (2), 127-142. <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/239> diakses pada 09 Oktober 2020
- Yasin, M.I& Apsari, N.C. (2020). Pembinaan Orang dengan Disabilitas Rungu untuk Mendapatkan Pekerjaan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. 7 (2) 393 405. <http://jurnal.unp.ac.id/prosiding/article/view/28435> diakses pada 06 Oktober 2020